

Proses dan Implikasi Naturalisasi Kewarganegaraan Indonesia dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006

The Process and Implications of Indonesian Citizenship Naturalization in the Context of Civic Education Based on Law Number 12 of 2006

Oleh: ^{1*}Mutia Nur Hidayah, ¹Armansyah Prasakti

E-mail: mutianurhidayah97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses dan implikasi naturalisasi kewarganegaraan Indonesia dalam konteks pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab di kalangan warga negara baru, serta sejauh mana pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dapat memperkuat integrasi sosial mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap motivasi dan peran warga negara baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampel yang diambil terdiri dari data sekunder yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, peraturan terkait, dan literatur yang relevan mengenai kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi prosedur naturalisasi serta implikasi hukumnya terhadap integrasi sosial warga negara baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan, memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan integrasi sosial warga negara baru, memperkuat rasa memiliki terhadap Indonesia, serta memperkuat persatuan dalam keragaman budaya.

Kata Kunci: Naturalisasi, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan

ABSTRACT

This study analyzes the process and implications of naturalization for Indonesian citizenship in the context of civic education, based on Law Number 12 of 2006 concerning the Citizenship of the Republic of Indonesia. The research questions address how civic education can foster awareness and responsibility among new citizens, and the extent to which Pancasila and Civic Education (PPKn) can strengthen their social integration. The purpose of this study is to explore the influence of civic education on the motivation and roles of new citizens in national and state life. The sample consists of secondary data sourced from Law Number 12 of 2006, related regulations, and relevant literature on citizenship and civic education. This study uses normative juridical methods and descriptive analysis to identify the naturalization procedure and its legal implications for the social integration of new citizens. The results indicate that civic education plays a crucial role in enhancing the social integration of new citizens, strengthening their sense of belonging to Indonesia, and fostering unity amidst cultural diversity.

Keywords : Naturalization, Indonesian Citizenship, Citizenship Education



© 2025 Mutia Nur Hidayah, Armansyah Prasakti. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

^{1*}Mutia Nur Hidayah, ¹Armansyah Prasakti

¹[*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*](#)

PENDAHULUAN

Proses naturalisasi kewarganegaraan Indonesia sangat penting dalam memfasilitasi individu asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, proses ini berlangsung melalui dua jalur, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi khusus (Sony & Suyono, 2024). Setiap individu yang ingin berpartisipasi dalam kewarganegaraan Indonesia diwajibkan untuk memenuhi syarat tertentu, seperti tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan dan mematuhi hukum yang berlaku (Amin & Sutrisno, 2024). Proses tersebut tidak hanya berdampak pada status hukum seseorang, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak politik dan sosial (Nadifa et al., 2025). Implikasi ini sangat penting dalam konteks integrasi sosial bagi individu baru, yang harus memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan kepada seluruh warga negara, termasuk mereka yang baru saja menjalani proses naturalisasi. Di sekolah, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara (Ramdani et al., 2024). Melalui PPKn, siswa diharapkan mampu membangun karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memahami sistem pemerintahan Indonesia, yang semuanya mendasari identitas dan karakter kewarganegaraan mereka (Pulhehe & Robandi, 2024). Penanaman nilai-nilai ini

sangat penting untuk menghindari perasaan alienasi di kalangan individu yang baru menjadi bagian dari masyarakat (Fitriyah, 2024).

Namun, meskipun sudah ada kerangka pendidikan yang mendukung, masih terdapat kurangnya penelitian yang mendalami bagaimana proses naturalisasi dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pendidikan kewarganegaraan (Faizah et al., 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat berfungsi sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab di kalangan warga negara baru. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menjadi sarana untuk transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai medium untuk meningkatkan integrasi sosial dan memahami peran mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Surahman et al., 2014). Hal ini menjadi lebih penting mengingat Indonesia adalah negara yang plural dan majemuk, di mana pemahaman terhadap perbedaan dan persatuan menjadi kunci untuk harmonisasi masyarakat (Dewantara et al., 2019).

Secara keseluruhan, proses naturalisasi dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saling terkait erat. Proses ini tidak hanya menjadikan individu sebagai warga negara, tetapi juga berfungsi untuk membangun rasa memiliki dan keterlibatan aktif dalam masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, memperkuat kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah sangat krusial untuk menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini (Fitriasari et al., 2020).

¹*Mutia Nur Hidayah, ¹Armansyah Prasakti

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada studi hukum terkait dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan aplikasi praktisnya dalam proses naturalisasi kewarganegaraan Indonesia dalam konteks pendidikan kewarganegaraan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang proses naturalisasi kewarganegaraan di Indonesia serta implikasinya, menganalisis berdasarkan ketentuan hukum yang ada, serta kaitannya dengan pengajaran dan pemahaman pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui dua teknik utama: Studi kepustakaan (*library research*): Mengumpulkan literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kewarganegaraan, naturalisasi, dan pendidikan kewarganegaraan.

Sampel Penelitian, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden) dan bahan hukum sekunder (literatur hukum, artikel, serta hasil penelitian terdahulu).

Metode analisis, setelah data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi:

- a. Prosedur naturalisasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam konteks pendidikan kewarganegaraan.
- b. Implikasi hukum dan sosial dari proses naturalisasi, termasuk hak dan kewajiban warga negara hasil naturalisasi, serta pengaruhnya terhadap pengajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Sumber data yang digunakan meliputi:

- a. Data primer: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan peraturan terkait lainnya.
- b. Data sekunder: Buku, jurnal, artikel yang relevan, serta wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam bidang kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses dan implikasi naturalisasi kewarganegaraan Indonesia dalam konteks pendidikan kewarganegaraan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 memainkan peran penting dalam integrasi sosial dan pembangunan karakter kewarganegaraan yang menyeluruh. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan vital dalam memastikan bahwa individu yang baru menjalani proses naturalisasi dapat beradaptasi dengan baik dan diterima dalam masyarakat Indonesia. Salah satu komponen penting dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kurikulum ini diharapkan tidak hanya menanamkan

¹*Mutia Nur Hidayah, ¹Armansyah Prasakti

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai karakter yang merupakan elemen kunci dalam membentuk identitas nasional (Dewi et al., 2021; Firmansyah & Dewi, 2021). Lebih dari itu, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki potensi untuk meningkatkan integrasi sosial, menghindari perasaan terasingi, serta memperkuat persatuan di tengah keragaman budaya dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, memperkuat kurikulum pendidikan kewarganegaraan di sekolah menjadi hal yang sangat penting, terutama di era globalisasi yang penuh tantangan ini.

1. Proses Naturalisasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 dan Implikasinya terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara Baru

Proses naturalisasi kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang mengatur dua jalur utama, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi khusus. Naturalisasi biasa dijelaskan sebagai proses yang diberikan kepada individu asing yang telah tinggal di Indonesia selama waktu yang ditentukan oleh undang-undang serta memenuhi berbagai persyaratan yang ada, termasuk persyaratan administratif dan sosial yang ditetapkan (Darusman, 2017). Sedangkan, naturalisasi khusus lebih diperuntukkan bagi individu yang memiliki kontribusi luar biasa kepada negara, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, atau budaya, yang diharapkan dapat mempercepat integrasi mereka ke dalam masyarakat Indonesia (Ramdhani, 2022). Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh individu yang ingin menjadi warga negara Indonesia adalah tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu, serta mematuhi hukum yang

berlaku, seperti tidak terlibat dalam tindak pidana.

Implikasi dari proses naturalisasi ini tidak hanya terbatas pada perubahan status hukum seseorang, tetapi juga menyangkut hak-hak politik dan sosial yang dimiliki oleh individu yang baru menjadi warga negara Indonesia. Sebagai warga negara baru, mereka berhak untuk memilih dalam pemilu, mendapatkan perlindungan hukum, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hukum negara, menjalankan kewajiban sebagai warga negara, dan turut serta dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, proses naturalisasi tidak hanya memberikan status kewarganegaraan, tetapi juga mendefinisikan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh individu yang baru saja menjadi bagian dari masyarakat Indonesia.

Implikasi sosial dari proses ini juga sangat penting. Proses naturalisasi tidak hanya berdampak pada status hukum, tetapi juga pada integrasi sosial individu yang baru. Individu yang baru menjadi warga negara Indonesia harus memahami dan menghargai nilai-nilai Pancasila, budaya lokal, serta sistem pemerintahan Indonesia yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika proses ini tidak disertai dengan pemahaman yang cukup, individu tersebut bisa merasa terasing atau mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan masyarakat Indonesia yang majemuk dan pluralistik.

2. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengintegrasikan Warga Negara Baru

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memainkan peran penting dalam

¹*Mutia Nur Hidayah, ¹Armansyah Prasakti

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

mengintegrasikan individu yang baru menjadi warga negara Indonesia ke dalam masyarakat. Salah satu mata pelajaran utama yang mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sejak diperkenalkan sebagai bagian dari kurikulum, PPKn bertujuan untuk membentuk karakter dan moral warga negara, yang sangat penting dalam konteks keberagaman sosial dan budaya Indonesia (Genika & Dewi, 2024). Dalam pandangan (Muniroh, 2019), PPKn merupakan evolusi dari Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang dirancang untuk membangun identitas nasional. Mata pelajaran ini berfokus untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Bagi individu yang baru saja melalui proses naturalisasi, pemahaman ini sangat penting agar mereka dapat mengerti peran mereka dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial di Indonesia.

Melalui pendidikan PPKn, warga negara baru diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang hukum dan hak-hak mereka sebagai warga negara, tetapi juga tentang kewajiban sosial dan politik yang harus mereka jalankan. Lebih dari itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk membangun karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi, gotong-royong, dan persatuan dalam keragaman. Hal ini sangat penting untuk mencegah perasaan alienasi di kalangan individu yang baru saja menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Mereka harus merasa diterima, dihargai, dan dihormati sebagai bagian dari bangsa

Indonesia yang plural, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda.

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga menjadi alat untuk membangun rasa memiliki terhadap negara. Dengan memahami sistem pemerintahan, hak-hak politik, serta tanggung jawab sebagai warga negara, individu yang baru saja menjalani proses naturalisasi dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penanaman nilai-nilai kewarganegaraan dalam pendidikan PPKn juga penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, di mana pemahaman terhadap perbedaan dan kemampuan untuk hidup berdampingan secara harmonis menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan bersatu.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai media untuk mentransfer pengetahuan kepada warga negara baru, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan integrasi sosial dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk terus memperkuat kurikulum PPKn agar dapat lebih efektif dalam menciptakan warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban mereka serta memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: proses naturalisasi kewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-

¹*Mutia Nur Hidayah, ¹Armansyah Prasakti

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

Undang Nomor 12 Tahun 2006 memiliki implikasi yang signifikan tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam aspek sosial dan politik. Proses ini mencakup dua jalur utama, yaitu naturalisasi biasa dan khusus, yang memungkinkan individu asing untuk menjadi warga negara Indonesia dengan memenuhi persyaratan tertentu, seperti tinggal di Indonesia dalam waktu yang ditentukan dan mematuhi hukum yang berlaku. Setelah menjadi warga negara Indonesia, individu tersebut memperoleh hak-hak politik dan sosial, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghormati hukum dan berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Implikasi sosial dari proses naturalisasi ini sangat penting, terutama dalam hal integrasi sosial individu yang baru menjadi warga negara. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, budaya lokal, serta sistem pemerintahan Indonesia merupakan kunci agar individu yang baru saja melalui proses naturalisasi dapat diterima dengan baik dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan pluralistik. Tanpa pemahaman yang cukup, mereka bisa merasa terasing atau kesulitan dalam beradaptasi.

Pendidikan kewarganegaraan, khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), memegang peran yang sangat penting dalam mengintegrasikan warga negara baru ke dalam masyarakat. Pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang mencakup toleransi, gotong-royong, dan persatuan dalam keragaman. Penanaman nilai-nilai ini diharapkan dapat mencegah perasaan alienasi dan memperkuat rasa memiliki terhadap negara Indonesia. Oleh karena itu,

penting untuk terus memperkuat kurikulum PPKn agar lebih efektif dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi, terutama di tengah tantangan globalisasi dan pluralitas yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. and Sutrisno, S. (2024). Penerapan kurikulum merdeka pada mata pelajaran pendidikan pancasila dalam meningkatkan nilai-nilai nasionalisme pada siswa. *jupenkei*, 1(4), 150-160. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v1i4.146>
- Darusman, Y. (2017). Kajian yuridis dualisme kewarganegaraan dalam undang-undang nomor: 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan (studi pada kasus gloria natapraja hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53. <https://doi.org/10.25157/jigi.v5i1.233>
- Dewantara, J., Suhendar, I., Rosyid, R., & Atmaja, T. (2019). Pancasila as ideology and characteristics civic education in indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5). <https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i5.1617>
- Dewi, D., Hamid, S., Dewi, M., Galand, P., & Yolandha, W. (2021). Membina karakter bangsa indonesia untuk anak sekolah dasar melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5241-5248. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1634>
- Dewi, K. and Najicha, F. (2024). Pendidikan kewarganegaraan sebagai strategi mempertahankan identitas nasional era globalisasi.

¹*Mutia Nur Hidayah, ¹Armansyah Prasakti

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

- DeCive, 4(1), 33-38.
<https://doi.org/10.56393/decive.v4i1.2066>
- Faizah, B., Santoso, M., & Cahyani, A. (2024). Analisis pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan penanaman karakter siswa di mts ma'arif nu 2 sutojayan. *SJIIP*, 1(2), 63-72.
<https://doi.org/10.62667/silabus.v1i2.132>
- Fikri, M. (2022). Pembentukan karakter mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Social Teknik*, 4(2), 150-162.
<https://doi.org/10.59261/jequi.v4i2.97>
- Firmansyah, M. and Dewi, D. (2021). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa sesuai nilai pancasila di era globalisasi. *Jurnal Pesona Dasar*, 9(1), 10-22.
<https://doi.org/10.24815/pear.v9i1.20607>
- Fitriasari, S., Masyitoh, I., & Baeihaqi, B. (2020). The role of pancasila education teachers and citizenship in strengthening character education based on pancasila values..
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.101>
- Fitriyah, R. (2024). Pentingnya pendidikan pancasila dalam pembentukan identitas kewarganegaraan. *garuda-widyakarya*, 2(2), 25-34.
<https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3075>
- Genika, P. and Dewi, D. (2024). Pendidikan kewarganegaraan dalam keterkaitan dengan pendidikan karakter di indonesia. *Konstruksi-Sosial*, 1(2), 33-40.
https://doi.org/10.56393/konstruksi_sosial.v1i2.220
- Herzog, B. (2019). Presenting ethnicity: israeli citizenship discourse. *Contemporary Review of the Middle East*, 6(3-4), 383-394.
<https://doi.org/10.1177/2347798919872840>
- Izma, T. and Kesuma, V. (2019). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa. *Wahana Didaktika Jurnal Ilmu Kependidikan*, 17(1), 84.
<https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v17i1.2419>
- Muniroh, M. (2019). Makalah modul 3 pendidikan kewarganegaraan keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan ips dan mata pelajaran lainnya.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/3by4z>
- Nadifa, E., Rahmi, H., Adrias, A., & Syam, S. (2025). Pengaruh mata pelajaran pkn terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan indonesia di sekolah dasar. *garuda-widyakarya*, 3(1), 253-265.
<https://doi.org/10.59581/garuda.v3i1.4850>
- Pertiwi, P. and Dewi, D. (2024). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter warga negara indonesia. *Konstruksi-Sosial*, 3(4), 105-110.
https://doi.org/10.56393/konstruksi_sosial.v1i12.275
- Pulhehe, N. and Robandi, B. (2024). Pancasila as the philosophical foundation of the indonesian curriculum. *Paradigma Jurnal Kajian Budaya*, 14(3), 397-416.
<https://doi.org/10.17510/paradigma.v14i3.1475>
- Ramdani, F., Ulwan, M., Arief, L., Al-Farisi, M., Rochiman, R., H, R., ... & Furnamasari, Y. (2024). Pentingnya pendidikan pancasila dalam membangun kesadaran identitas nasional dan semangat cinta tanah air pada mahasiswa. *Nakula*, 2(3), 282-296.

¹*Mutia Nur Hidayah, ¹Armansyah Prasakti

¹Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta

<https://doi.org/10.61132/nakula.v2i3.858>

Ramdhani, H. (2022). The citizenship paradigm debate in dual citizenship discourses in indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 43-53. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.43-53>

Sony, B. and Suyono, S. (2024). Meneguhkan pancasila sebagai ideologi bernegara mahasiswa prodi teknik industri universitas pgri adi buana surabaya. *Khatulistiwa Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(3), 355-366. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i3.4076>

Surahman, E., Husaini, A., Mujahidin, E., & Saefuddin, D. (2014). Pengembangan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tingkat sekolah menengah atas dalam perspektif islamisasi ilmu dan pembinaan akhlak mulia. *Ta Dibuna Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 114. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v3i2.565>

¹*Mutia Nur Hidayah, ¹Armansyah Prasakti

¹[Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta](#)